

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL VIETNAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)

Oleh

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3.257.483 km², di mana laut menjadi kawasan terbesar di Negara Indonesia secara keseluruhan hingga disebut sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati di laut dan menjadikan wilayah ZEE Indonesia rentan untuk dilintasi oleh kapal berbendera asing. Perlintasan ini turut membawa pada aktivitas kapal berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak diketahui secara jelas perizinannya. Walaupun hukum nasional di Indonesia sudah mengatur sanksi secara tegas terhadap pelaku warga negara asing, namun penerapannya tetap perlu memerhatikan hukum internasional yang memiliki ketentuan secara luas dalam hal tindak pidana transnasional. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan putusan nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam putusan nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai bahan hukum sekunder terkait pertanggungjawaban pidana terhadap nakhoda kapal bantu dalam perkara *illegal fishing*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber hakim dan akademisi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg ditetapkan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana baik *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

mens rea (niat jahat) sebagai alasan pelaku untuk bertanggungjawab telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga didasarkan pada aspek yuridis yang mencakup penerapan norma hukum nasional dengan prinsip internasional. Aspek non-yuridis, yakni secara filosofis mempertimbangkan keadilan ekologis yang wajib dijaga untuk perlindungan ekosistem laut, serta secara sosiologis mempertimbangkan bahwa modus operandi dipandang dapat menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan nasional dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan terkhusus bidang perikanan dapat menambahkan alternatif sanksi lain yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pengawasan dan penelusuran terhadap kapal-kapal asing yang berlayar di wilayah ZEEI. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan instrumen internasional lain seperti PSMA dan *FAO Compliance Agreement* untuk mendorong harmonisasi putusan dengan standar global serta memperluas perspektif dalam penyelesaian perkara.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, *illegal fishing*, zona ekonomi eksklusif.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL FISHING BY VIETNAMESE VESSELS IN THE INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (IEEZ) (Verdict Study Number: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)

By

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

Indonesia has a total maritime area of 3,257,483 km², with the maritime areas constituting the largest portion of its territory, making it both a maritime and archipelagic nation. This geographical condition makes Indonesia rich in marine biological resources and makes Indonesia's EEZ vulnerable to being traversed by foreign-flagged vessels. This traversal also leads to foreign-flagged vessels engaging in fishing activities for which their permits are unclear. Although Indonesian national law has clearly stipulated sanctions against foreign nationals who commit such offences, its implementation must still take into account international law, which provides broader provisions governing transnational crimes. The issues to be discussed in this study are: What is the criminal liability for perpetrators of illegal fishing based on decision number: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg and what are the grounds for the judge's decision to impose sanctions on perpetrators of illegal fishing in decision number: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg?

This study uses a normative legal approach, utilising the decision of the Tanjung Pinang District Court as secondary legal material related to criminal liability for the captain of an auxiliary vessel in an illegal fishing case. Data collection methods include literature review and interviews with judges and academics. Qualitative analysis is used to produce descriptive data.

The results of this research and discussion indicate that the criminal liability of illegal fishing perpetrators in Decision Number 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg was determined based on Article 92 Jo Article 26 Paragraph (1) and Fisheries provisions under Law Number 11 of 2020 on Job Creation Jo Article 5 paragraph (1) letter a Jo Article 102 of Law Number 45 of 2009 amending Law Number 31 of 2004 on Fisheries, in which both the actus reus (unlawful conduct) and mens rea (criminal intent) elements as the grounds for liability were fulfilled. The judges' considerations in rendering the decision were also based on juridical aspects encompassing the application of national legal norms in harmony with

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

international principles. The non-juridical considerations included philosophical grounds, namely the imperative of ecological justice in protecting marine ecosystems, and sociological grounds, namely that the modus operandi employed posed ecological harm affecting the sustainability of national fisheries resources and the economic livelihood of coastal communities.

This study recommends that the formulation and implementation of legislation, particularly in the field of fisheries, should include alternative sanctions that can have a deterrent effect. Law-enforcement agencies are also expected to optimize monitoring efforts and tracing mechanisms toward foreign vessels operating within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). Judges are further encouraged to consider additional international instruments, such as the Port State Measures Agreement (PSMA) and the FAO Compliance Agreement, to promote harmonization of judicial decisions with global standards and to broaden the analytical framework in resolving similar cases.

Keywords: criminal liability, illegal fishing, exclusive economic zone.